

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membangun ketahanan dan kemandirian pangan menjadi sangat penting dan strategis, sebagai penegasan atas upaya dari pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam mencapai tujuan negara mensejahterakan rakyat serta dalam rangka pemenuhan hak atas pangan sebagai hak asasi manusia (HAM). Salah satu faktor penting dalam pembangunan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan adalah ketersediaan lahan pertanian pangan. Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagaikarunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu lahan pertanian pangan di Indonesia semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.¹

Keadaan alih fungsi lahan ini mengkhawatirkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah karena akan kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Karena itu, terpenuhinya kebutuhan pangan di dalam suatu negara merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Terlebih lagi pangan juga memegang kebijakan penting dan strategis di Indonesia berdasar pada pengaruh yang dimilikinya secara sosial, ekonomi, dan politik. Namun ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan menghadapi persoalan serius karena ketersediaan lahan

¹ Retno Kusnati, *Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 12

pertanian pangan yang dialih fungsikan ke lahan non pertanian terus meningkat. Permasalahan ini menuntut Negara yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk melindungi lahan pertanian pangan agar ketersediaan lahan pertanian pangan dapat terus dipertahankan guna memenuhi kebutuhan hak atas pangan.²

Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan. Untuk melindungi lahan pertanian pangan secara terus menerus telah dibentuk ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Ketentuan ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ditentukan bahwa Provinsi Kabupaten/Kota menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang salah satunya adalah kewajiban untuk menetapkan kawasan pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sehingga diharapkan keberadaannya dapat berkelanjutan.³

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai potensi yang besar pada sektor pertanian. Untuk mendukung sektor ini, orientasi pengembangan sektor pertanian adalah dengan mengembangkan komoditi berbasis lokal, mengembangkan sektor produksi, pengembangan kawasan sektor pertumbuhan, dan melanjutkan kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian. Khususnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Hampir semua wilayah di Provinsi Jambi mengalami alihfungsi lahan sawah menjadi penggunaan lain. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

² Dr. Ir. Gatot M.S., DAA, *Lahan dan Kedaulatan Pangan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 37

³ Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Data Hasil Ukur LP2B Tanjung Jabung Timur, Diakses dari <http://dispertan.tanjabtimkab.go.id/>, Tanggal 27 September 2016, Pukul 19:02 WIB

yang merupakan salah satu lumbung pangan provinsi ini menjadi salah satu wilayah dengan kejadian alihfungsi lahan sawah tertinggi.⁴

Tabel 1.1

Luas lahan sawah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Nama Kecamatan	Area Terpilih					Area Tidak Terpilih (Ha)	Jumlah didalam & diluar Area (Ha)	Estimasi Sawah Dalam Kawasan Hutan (Ha)	Total (Ha)
		Luas Sawah (Ha)								
		Irigasi Jumlah	Tadah Hujan	Pasang Surut	Lebak					
1	Mendahara Ulu	-	-	-	-	-	57	57	-	57
2	Geragai	-	3	3	-	6	804	810	9	819
3	Dendang	-	1.933	903	-	2.836	-	2.836	85	2.921
4	Sabak Timur	-	947	4.119	-	5.066	-	5.066	198	5.264
5	Sabak Barat	-	202	239	96	537	36	573	-	573
6	Rantau Rasau	-	664	3.299	-	3.963	-	3.963	-	3.963
7	Berbak	-	5.456	463	-	5.919	-	5.919	1.120	7.039
8	Nipah Panjang	-	1.634	3.007	-	4.641	-	4.641	532	5.173
9	Sadu	-	1.308	945	-	2.253	-	2.253	43	2.296
10	Hutan	-	-	285	-	285	-	285	113	418
	Jumlah	-	12.147	13.263	96	25.506	897	26.403	2.120	28.523

⁴ Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Diakses dari <http://dispertan.tanjabtimkab.go.id/>, Tanggal 27 September 2016, Pukul 19:32 WIB

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peran penting sebagai pelayanan publik khususnya dibidang pertanian dan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berhasil atau tidaknya kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas maupun programnya sangat ditentukan sejauh mana organisasi tersebut didukung oleh sumber daya manusia yang secara efektif melaksanakan program-program kerjanya. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun fungsi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, yaitu;

- a. Perumusan kebijakanteknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertanian Tanaman Pangan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis

operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.⁵

Kinerja suatu birokrasi publik merupakan suatu isu yang sangat aktual yang terjadi pada masa sekarang ini. Masyarakat masih memandang kinerja dari birokrasi publik pada saat ini belum bisa memberikan rasa kepuasan yang tinggi, sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemerintah menjadi sorotan yang tajam, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Hal tersebut disebabkan masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah. Disisi lain, pengukuran keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara obyektif.⁶

Ketika pemeliharaan saluran air primer dan sekunder terus dilakukan oleh Dinas, pelayanan itu seharusnya ditujukan untuk keuntungan petani pangan, bukan untuk petani kebun. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur cepat tanggap terhadap ancaman tersebut. Diantara kabupaten/kota di Provinsi Jambi, hanya kabupaten ini yang menerbitkan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B. Pada Perda Nomor 18 tahun 2013 ini ditetapkan 9 lokasi yang menjadi target perlindungan LP2B mencakup 17.000 ha lahan sawah plus 4000 ha lainnya sebagai cadangan LP2B.⁷ Namun, penerapan perda secara menyeluruh belum bisa dilakukan karena petani yang setuju bergabung dalam program ini atau yang menandatangani surat pernyataan memiliki LP2B belum sampai 50%. Itu artinya, pemerintah daerah harus lebih bekerja keras untuk meyakinkan petani bahwa program LP2B menguntungkan bagi mereka dan baik bagi

⁵ PERDA No 01 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, hlm. 11

⁶ Kurniawan Sukowati, *Kinerja Organisasi Kantor Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen*. Tesis Administrasi Publik Universitas Sebelas Maret.

⁷ PERDA No 18 Tahun 2013, Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, hlm. 14-15

ketahanan pangan negeri ini, tentu saja meyakinkan petani tidak bisa dengan sekedar berbicara saja dan tidak bisa juga dengan paksaan karena sawah adalah milik pribadi. Dan jika mengacu kepada PP Nomor 12 tahun 2012 tentang insentif LP2B, terdapat kewenangan bertingkat dalam menyediakan insentif ini yaitu insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Dengan pengaturan yang baik, di masa datang bisa dihindari terjadinya overlap pemberian insentif, atau insentif yang datangnya terlambat (misalnya pemberian bibit datang terlambat, ketika musim tanam sudah berakhir) atau pemberian insentif yang salah sasaran, diberikan kepada petani yang tidak memenuhi syarat atau tidak layak mendapatkannya.⁸

Tabel 1.2

Laju Alih Fungsi Lahan Sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013-2016

Kabupaten	BPS 2016	BPS 2013	KONVERSI
Tanjung Jabung Timur	28.463	32.940	(4.477)

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dari data diatas dapat terlihat jelas bahwa penurunan dan terjadi alih fungsi lahan sawah dalam tiga tahun terakhir seluas 4.477 Ha, dan bisa dibayangkan setiap bangun tidur daerah tersebut kehilangan areal sawah seluas 3.07 Ha. Dapat diingat bahwa pemberian insentif bukan merupakan suatu bentuk kompensasi agar petani pangan tidak mengalihfungsikan lahannya, atau menyebabkan ketergantungan petani

⁸ Hj. Asnelly Ridha Daulay, Dalam penelitian untuk kandidat doktor pada program studi sumber daya alam dan lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Senin 04 Juli 2016. Diakses dari <file:///C:/Users/WINDOWS/Documents/SKRIPSI/INFO%20JAMBI%20%20BERITA%20JAMBI%20HARI%20INI%20%20Selalu%20yang%20Pertama%20-%20Alihfungsi%20Lahan%20Sawah%3b%20Saatnya%20Petani%20Memiliki%20Bargaining%20Power.htm> Tanggal 28 September 2016, Pukul 20:17 WIB

yang terus menerus kepada bantuan pemerintah. Insentif bertujuan untuk merangsang petani meningkatkan produktivitasnya sehingga pada saatnya nanti, lahan sawah akan sama atau bisa jadi melebihi kebun sawit atau karet atau penggunaan lahan lainnya. Dan jika saat itu tiba, insentif untuk petani pangan tidak diperlukan lagi atau digeser untuk kepentingan lain karena mereka telah siap bersaing bebas dengan komoditi pertanian lainnya. Tentu saja upaya lain seperti perbaikan pengairan, kemasaman lahan atau peningkatan indeks tanam harus dilakukan pemerintah agar terbangun lingkungan yang kondusif bagi usaha pertanian pangan.⁹Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B juga mengusungbeberapa pasal dalam regulasi ini mencantumkan hak-hak yang akan diterima oleh petani yang lahannya termasuk dilindungi, plus kewajiban pemerintah untuk memberikan insentif tersebut.

Guna peningkatan produksi pangan, maka pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan mengutamakan lahan petani yang termasuk ke dalam LP2B agar petani yang akan mengalihkan lahan tanaman pangannya menjadi lahan sawit di kordinasikan terlebih dahulu. Dalam hal ini Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) pemerintah setempat juga akan melakukan pendekatan, jika memang ada beberapa petani yang akan mengalih fungsikan lahannya maka dari pihak BP3K akan mengedepankan cara persuasif,kekeluargaan apa alasan mereka yang sesungguhnya hingga alih fungsi, bisa saja petani tersebut jarang mengikuti rapat kelompoktani hingga tidak tahu hasil rapat yang di lakukan, misalnya masalah keterlambatan datang bibit kedelai, karena bibit kedelai tersebut telah di kontraktual kan oleh pusat.¹⁰

⁹ Gatot Irianto, *Menuju Indonesia Berdaulat Pangan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm.201

¹⁰ Ahmad Rahadyan, *SAMUDRA (Tanjung Jabung Timur Dalam Majalah)*, Panota Grup, Jambi, 2016, hlm.3-4

Oleh sebab itu topik ini menjadi penting untuk di teliti tentang kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam upaya melaksanakan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan apakah dapat tepat pada sasarannya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat topik ini sebagai skripsi guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul “Analisis Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi 2016”(Studi Kasus Dalam Melaksanakan Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Melaksanakan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016?
2. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Melaksanakan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan perlindungan lahan pertanian yang di alih fungsikan, dan;

2. Mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Melaksanakan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

- a. Untuk memahami bagaimana pemerintah daerah dapat melaksanakannya Peraturan Daerah yang sudah disepakati.
- b. Untuk memahami makna dan peran serta Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang di lakukan pemerintah kepada masyarakat.
- d. Agar pemerintah lebih bisa manage tugas yang diberikan, supaya pemerintah tidak menyimpang dari tujuan-tujuannya, supaya dapat menjadi pokok inti dan mendapat titik temu atau hasil dari kebijakan yang telah dibuat.

Manfaat Praktis:

- a. Secara Praktis manfaat yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kalangan akademis, praktisi-praktisi, lembaga pendidikan maupun organisasi masyarakat secara umum tentang bagaimana kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- b. Supaya masyarakat bisa memahami peran tugas pokok dan fungsi Pemerintah yang diberikan dan tidak menjadi kekeliruan bagi masyarakat.

E. Kerangka Dasar Teori

Dalam menjelaskan permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan kerangka dasar teori, kerangka dasar teori yang dimaksud disini diperlukan dalam setiap penelitian untuk memberikan landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam proses penelitian.¹¹ Kerangka teori juga membantu seorang penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.¹² Didalam penelitian ini di gunakan beberapa teori sebagai kerangka pemikiran, yakni:

1. Pemerintah Daerah

1.1 Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah:

Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah lainnya (kepala dinas, kepala badan, dan unit-unit kerja lainnya yang dikendalikan oleh Sekretariat Daerah).

1.2 Pemerintahan Pusat

Pengertian Pemerintahan Pusat adalah Pemerintah, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Hubungan dalam fungsi pemerintahan antara pemerintahan

¹¹Masri singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES, 1989, Hal.21.

¹²Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, Hal.65.

pusat dan juga pemerintahan daerah dilaksanakan dengan sistem Otonomi, dalam sistem otonomi ini dikenal dengan adanya desentralisasi, dekosentrasi dan juga tugas pembantuan. Hubungan ini memiliki sifat koordinatif administratif, yang artinya hakikat fungsi pemerintahan ini tidak ada yang saling membawahi, agar terjadinya harmonisasi antara daerah maupun pusat.

Dari pengertian diatas, dapat dilihat bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara, sedangkan Gubernur,bupati/walikota ialah pemegang kekuasaan pemerintah daerah.¹³

Dalam ajaran “Trias Politica” yang dikemukakan oleh Montesque, dimana kekuasaan pemerintahan terpisah atas kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Legislatif dan juga kekuasaan Yudikatif.Namun berbeda dengan sistem Pemerintahan di Indonesia, di Indonesia sendiri tidaklah menerapkan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi adanya sistem pembagian kekuasaan yang dapat diimplementasikan dalam:

- a. Kekuasaan Eksekutif yang dilakukan oleh presiden RI beserta wakil presiden dan menteri-mentrinnya.
- b. Kekuasaan Legislatif yaitu dalam membuat peraturan yang dikenal dengan Undang-Undang yang dilakukan oleh DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Kekuasaan Yudikatif yaitu dalam bidang peradilan, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung serta perangkatperangkatnya di daerah.¹⁴

2. Kinerja Organisasi

2.1 Pengertian Kinerja

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*).

Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara bahwa istilah kinerja berasal dari kata

¹³Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

¹⁴ Montesquieu, *THE SPIRIT OF LAW (Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik)*, Nusamedia, 2011.

job performance atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.¹⁵

Berdasarkan definisi di atas maka disimpulkan bahwa kinerja Sumber Daya Manusia adalah prestasi kerja atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai Sumber Daya Manusia persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut A. A. Prabu Mangkunegara dalam bukunya *Evaluasi Kinerja SDM*, manajemen kinerja merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pencapaian kinerja dan dikomunikasikan secara terus menerus oleh pimpinan kepada karyawan, antara karyawan dengan atasannya langsung. Selanjutnya A. A. Prabu Mangkunegara mengemukakan tujuan dari pelaksanaan manajemen kinerja, bagi para pimpinan dan manajer adalah :

- a. Mengurangi keterlibatan dalam semua hal;
- b. Menghemat waktu, karena para pegawai dapat mengambil berbagai keputusan sendiri dengan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan serta pemahaman yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang benar.
- c. Adanya kesatuan pendapat dan mengurangi kesalahpahaman diantara pegawai tentang siapa yang mengerjakan dan siapa yang bertanggung jawab.
- d. Mengurangi frekuensi situasi dimana atasan tidak memiliki informasi pada saat dibutuhkan.
- e. Pegawai mampu memperbaiki kesalahannya dan mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya kesalahan atau inefisiensi.

¹⁵ Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 67

Adapun tujuan pelaksanaan manajemen kinerja bagi para pegawai adalah :

- a. Membantu para pegawai untuk mengerti apa yang seharusnya mereka kerjakan dan mengapa hal tersebut harus dikerjakan serta memberikan kewenangan dalam mengambil keputusan;
- b. Membarikan kesempatan bagi para pegawai untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan baru;
- c. Mengenali rintangan-rintangan peningkatan kinerja dan kebutuhan sumber daya yang memadai;
- d. Pegawai memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pekerjaan dan tanggungjawa kerja mereka.¹⁶

Berdasarkan definisi dan tujuan-tujuan yang dikemukakan oleh Mangkunegara, maka manajemen kinerja adalah suatu proses perencanaan dan pengendalian kerja para aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya, dalam tujuan Mangkunegara berbicara tentang bagaimana adanya pemahaman antara pimpinan dan bawahan dalam menyelesaikan, mengambil keputusan dan mendapatkan pemahaman yang baik tentang pekerjaan dan tanggung jawab.

Kinerja dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh organisasi mencapai hasil ketika dibandingkan dengan pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan.¹⁷

Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang yang disebut dengan bawahan, sebuah

¹⁶ Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 20

¹⁷ Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta : Gava Media, 2004, hlm. 193

organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama.¹⁸

Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.¹⁹

Kumorotomo dalam Agus Dwiyanto mengemukakan bahwa untuk menilai kinerja organisasi dapat digunakan beberapa kriteria sebagai pedoman penilaian kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain :

a. Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.

b. Efektivitas

Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tercapai, hal tersebut erat kaitannya dengan Rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.

c. Keadilan

¹⁸ Armosudiro, *Konsep Organisasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

¹⁹ Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Bandung: PT Reflika Aditama, Hlm.7.

Mempertanyakan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik, kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi, isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan pada kelompok pingiran dan sebagainya, akan mampu dijawab oleh kriteria ini.

d. Daya Tanggap

Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau Pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggung jawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.²⁰

Begitu pentingnya penilaian kinerja bagi keberlangsungan organisasi dalam mencapai tujuan, maka perlu adanya indikator-indikator pengukuran kinerja yang dipakai secara tepat dalam organisasi tertentu. Menurut Agus Dwiyanto penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup dilakukan dengan menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas.²¹

Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik juga muncul karena tujuan dan misi birokrasi publik seringkali bukan hanya memiliki *stakeholder* yang banyak dan memiliki kepentingan yang sering berbenturan satu sama lain yang menyebabkan birokrasi publik mengalami kesulitan

²⁰ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006 Hlm. 52

²¹ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006 Hlm. 49

untuk merumuskan misi yang jelas. Akibatnya ukuran kinerja organisasi publik di mata para stakeholder juga berbeda-beda.

Agus Dwiyanto mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya indikator yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

a. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep Produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

b. Kualitas layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

c. Responsivitas

Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjukkan pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan

misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki Responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

d. **Responsibilitas**

Menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

e. **Akuntabilitas**

Menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat diguna untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau Pemerintah, seperti pencapaian target. kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu

dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.²²

Sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas kepuasan pelanggan (jasa) yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1985 oleh Zeithaml, Berry dan Parasuraman²³ meliputi 10 dimensi, yaitu:

a. Tangibles

Keberadaan fisik pemberi pelayanan, meliputi tempat parkir, fasilitas gedung, tata letak dan tampilan barang, kenyamanan fasilitas fisik, peralatan dan perlengkapan modern.

b. Reliability

Mencakup 2 hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance) dan kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan memberikan pelayanan (jasa) nya secara tepat sejak saat pertama (right in the first time). Selain itu juga berarti bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya.

c. Responsiveness

Pelayanan yang baik harus disertai dengan tingkat keikutsertaan / keterlibatan dan daya adaptasi yang tinggi, yaitu membantu dengan segera memecahkan masalah.

d. Competence

²² Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006 Hlm. 50

²³ Parasuraman, Valarie A. Z. And Berry. *Delivering Service Quality*. Mc Milan, New York, 2002, Hlm. 21

Pelayanan yang baik harus didasarkan kepada kecakapan/keterampilan yang tinggi.

e. Access

Meliputi memberikan/menyediakan keinginan pelanggan dan pelayanan yang mudah dihubungi.

f. Courtesy

Pelayanan yang baik harus disertai dengan sikap keramahan, kesopanan kepada pihak yang dilayani.

g. Communication

Pelayanan yang baik harus didasarkan kepada kemampuan berkomunikasi yang baik dengan pihak yang dilayani.

h. Credibility

Pelayanan yang baik harus dapat memberikan rasa kepercayaan yang tinggi kepada pihak yang dilayani.

i. Security

Pelayanan yang baik harus memberikan rasa aman kepada pihak yang dilayani dan membebaskan dari segala resiko atau keragu-raguan pelanggan.

j. Understanding The Customer

Pelayanan yang baik harus didasarkan kepada kemampuan menanggapi atau rasa pengertian kepada keinginan pihak yang dilayani.

2.2 Pengertian Program Kerja

Program kerja dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita cita organisasi. Ada dua alasan pokok mengapa program kerja perlu disusun oleh suatu organisasi :

a. Efisiensi organisasi

Dengan telah dibuatnya suatu program kerja oleh suatu organisasi maka waktu yang dihabiskan oleh suatu organisasi untuk memikirkan bentuk kegiatan apa saja yang akan dibuat tidak begitu banyak, sehingga waktu yang lain bisa digunakan untuk mengimplementasikan program kerja yang telah dibuat.

b. Efektifitas organisasi

Keefektifan Organisasi juga dapat dilihat dari sisi ini, dimana dengan membuat program kerja oleh suatu organisasi maka selama itu telah direncanakan sinkronisasi kegiatan organisasi antara bagian kepengurusan yang satu dengan bagian kepengurusan yang lainnya.

2.3 Jenis Program-Program Kerja

Program kerja akan dibuat oleh suatu organisasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi yang bersangkutan, jenis jenis program kerja dapat dibedakan antara lain:

a. Program kerja untuk satu periode kepengurusan

Jenis program kerja ini biasanya dibuat oleh organisasi untuk satu periode kepengurusan, sehingga kegiatan rapat kerja (raker) organisasi hanya dilakukan sekali dalam satu periode kepengurusan dan untuk tahap selanjutnya akan diadakan evaluasi dan koordinasi dari program kerja yang telah ditetapkan.

b. Program kerja untuk waktu tertentu

Jenis program kerja seperti ini disusun untuk suatu jangka waktu tertentu biasanya triwulan, caturwulan, semester dan lain lain. Dalam pembuatan metode program kerja seperti ini maka akan ditemui bahwa suatu organisasi akan mengadakan rapat kerja (raker) organisasi lebih dari sekali dalam satu periode kepengurusan.

Menurut Prawirosentono bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau kelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja program yaitu berkenaan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program yang telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan dari program tersebut.²⁴

Menurut Soesilo dalam Hessel Nogi kinerja suatu organisasi dipengaruhi adanya faktor-faktor berikut :

- a. Struktur organisasi
- b. Kebijakan pengelolaan berupa visi dan misi organisasi
- c. Sumber daya manusia
- d. Sistem informasi manajemen

²⁴ Prawirosentono, *Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu*, Bumi Aksara, 2007, hlm.176

- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan antara konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan merupakan bagian dari definisi-definisi yang berisi penjelasan dari konsep yang kita gunakan. Penelitian ini menggunakan definisi konseptual sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Kinerja Organisasi

Kinerja Organisasi adalah tentang seberapa jauh organisasi mencapai hasil ketika dibandingkan dengan pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan, kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi untuk memuaskan pengguna jasa.

G. Definisi Operasional

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara

mengukur suatu variabel²⁵. Indikator pengukuran kinerja meliputi lima indikator, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kelima indikator ini dipilih dengan alasan bahwa indikator-indikator tersebut telah mewakili dari beberapa indikator yang banyak digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi publik dari dalam dan luar organisasi.

A. Indikator Pengukuran Kinerja ;

1. Produktivitas

- a. Terealisasinya program Pertanian Pangan Berkelanjutan
- b. Hasil sesuai target

2. Kualitas Pelayanan

- a. Tangibles (Bukti Fisik)
- b. Responsibilitas
- c. Access (Menyediakan layanan yang mudah dihubungi)

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja :

- a. Struktur organisasi
- b. Kebijakan
- c. Sumber daya manusia
- d. Sistem informasi manajemen
- e. Sarana dan prasarana

²⁵ Ibid, Hlm. 21

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan atau prosedur lain dalam penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sebagainya yang mendukung proses penelitian.²⁶

Mohammad Natsir mengatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk membuat atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.²⁷

Selanjutnya Winarno Surachmad mengatakan bahwa ciri-ciri yang terdapat dalam penelitian deskriptif yaitu; pertama, merumuskan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah-masalah aktual. Kedua, data-data yang dikumpulkan pertama-tama dijelaskan dan dianalisa.²⁸

Pada akhirnya operasional penelitian deskriptif ini berkisar pada pengumpulan data yang selanjutnya disusun, diolah, ditafsirkan dan kemudian data yang telah diolah tersebut telah diberi makna rasional dengan mematuhi prinsip-prinsip logika untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dan kritis.

2. Unit Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan narasumber Kepala Kantor dan staf. Alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu guna mengetahui program atau kebijakan apa saja yang telah di buat guna mengantisipasi dan mengurangi alih fungsi lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

²⁶ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, hlm.6

²⁷ Moh. Natsir, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta: 1993, hlm. 105.

²⁸ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Dan Teknik*, Bandung: Pustaka Pelaja, Hlm. 132.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Mengenai jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dengan menggunakan data sekunder dan data primer, dimana data-data tersebut berasal dari sumber-sumber yang telah ada untuk kemudian menjadi rujukan bagi penulis. Penjelasan dari data sekunder dan data primer adalah sebagai berikut :

c. Data Primer

Data primer ini akan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan *Stakeholdernya* untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam pengumpulan data, yaitu dengan wawancara dan observasi terhadap Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan beserta jajarannya dan masyarakat tani sebagai *stakeholder*.

d. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh suatu organisasi atau perorangan yang didapatkan dari pihak lain yang mengumpulkan dan mengelolanya.²⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

²⁹ Siti Waridah DKK, *Sosiologi2*, PT Bumi Askara, Jakarta, 2001, Hlm. 91

Tabel 1.3**Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis Data	Data Yang Dibutuhkan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Primer	Tanya jawab sepihak berdasarkan kepada tujuan penelitian	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Wawancara
		Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Kepala Kelompok Tani Kabupaten Tanjung Jabung Timur	
Sekunder	Lakip Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	Bagian Administrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Dokumen
	Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.		
	Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.		
	Perda No 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian cara untuk pengumpulan data adalah salah satu hal yang sangat krusial dalam menentukan proses dari suatu penelitian. Hasil akhir dari suatu penelitian tentu akan ditentukan oleh penggunaan langkah pengumpulan data. Apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data tentu sangat mempengaruhi hasil akhir dari penelitian. Untuk mencegah dari kesalahan dalam langkah pengumpulan data dan menghasilkan suatu data yang baik dan benar dalam suatu penelitian, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.³⁰

Salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan metode tanya jawab langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan menggunakan pedoman atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Dalam Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara ini peneliti akan mewawancarai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan beserta stafnya dan beberapa masyarakat tani sebagai *stakeholdernya*, yang berkaitan dengan Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tabel 1.4

Narasumber Penelitian

NO	NAMA	JABATAN
1	Ir. Akhmad Maushul	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2	Ir. Mahmud	Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Peratanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3	M. Yosrial S.P	Kepala Bagian administrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

³⁰ Burham Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2007, Hlm. 111

		Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4	Elawati S. P	Seksi Perencanaan & Penyusunan Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5	Parlin	Kepala Persatuan Petani Kabupaten Tanjung Jabung Timur

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan perkiraan terhadap peristiwa itu.³¹ Jadi dokumentasi merupakan suatu metode yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan³² Dalam penelitian ini dilakukan observasi dengan pengamatan kejadian-kejadian di lapangan dan akan diingatkan untuk perkembangan pengamatan di lapangan.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan merujuk kepada pemaparan Salim yaitu analisa data kualitatif sebagai model alir (*flow model*), yang

³¹ Winarno Surahmad, *Dasar-Dasar Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 1987, Hlm. 134

³² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D.2013*. Alfabeta. Bandung. Hlm. 231

terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data yang dibutuhkan di lapangan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan, serta pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

b. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data-data kasar yang diperoleh di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data yang diperoleh dari lapangan dan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah diringkaskan dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah untuk dipahami.

d. Menarik kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang telah diperoleh dan yang telah direduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah kepada permasalahan serta mampu menjawab permasalahan yang ada sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid.³³

³³ Salim, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.